

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM UPAYA  
MENINGKATKAN KUALITAS INFRASTRUKTUR  
(Studi di Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik**



**Oleh :**

**KRISTOFEL TANGGU MARA  
2016210095**

**KOMPETENSI KEBIJAKAN PUBLIK  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi  
MALANG  
2022**

## **RINGKASAN**

Pelaksanaan strategi perbaikan kerangka kota merupakan rangkaian latihan yang dikoordinasikan oleh pemerintah kota dengan mengikutsertakan badan permusyawaratan kota dan wilayah setempat. Pokok-pokok kajian ini adalah (1) untuk pelaksanaan strategi pemerintah kota dengan tujuan akhir untuk lebih mengembangkan kualitas kerangka, (2) elemen pendukung dan faktor penghambat dalam melakukan pendekatan pemerintah kota dengan tujuan akhir untuk lebih mengembangkan kualitas pondasi. Jenis pemeriksaan yang digunakan oleh spesialis adalah eksplorasi yang pasti dengan pendekatan pemeriksaan subjektif. Area eksplorasi dilaksanakan di Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Sumber informasi dari eksplorasi ini adalah informasi penting dan informasi tambahan. Pemilahan informasi diselesaikan melalui persepsi, pertemuan dan studi tulisan. Pemeriksaan informasi dilakukan melalui beberapa tahapan, lebih spesifiknya; Reduksi Data (Data Reduction), Penyajian Data (Data Display) dan Penarikan Kesimpulan (Verifikasi). Legitimasi informasi, legitimasi informasi dan kemampuan beradaptasi (transbelievability).

Hasil tinjauan menunjukkan bahwa pelaksanaan pendekatan pemerintah kota dengan tujuan akhir untuk bekerja pada sifat kerangka kota dibuat dengan mempertimbangkan standar kemungkinan publik atau SNI. Variabel pendukung dalam melaksanakan pendekatan pemerintah kota dengan tujuan untuk lebih mengembangkan kualitas kerangka kerja adalah batasan moneter, sifat SDM daerah, kerjasama kelompok masyarakat, sifat bahan yang digunakan dan unsur pendukung kondisi keuangan dan cuaca.

**Kata kunci : Implementasi, Pemerintah Desa Dan Infrastruktur**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pemerintah kota merupakan salah satu dasar negara dalam pembangunan kelembagaan. Pemerintah kota memainkan peran penting dalam setiap proses strategi perbaikan kerangka kota. Mengingat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 angka 2, yang dimaksud dengan pemerintahan kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan daerah sekitarnya dalam rangka pemerintahan NKRI, sedangkan organisasi pemerintahan kota adalah Pemerintahan Desa yang terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Kota-kota diberikan kemerdekaan untuk mengendalikan dan mengurus kepentingan daerah setempat dengan memperhatikan titik tolak, adat istiadat, dan perkembangan sosial dan sosial daerah setempat kota, serta memutuskan dan mengawasi yayasan-yayasan kota. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Pembangunan Desa adalah suatu usaha mengusahakan kepuasan dan kehidupan pribadi untuk sebaik-baiknya bantuan pemerintah daerah kota.

Pelaksanaan strategi perbaikan pondasi kota merupakan rangkaian latihan yang dikoordinasikan oleh pemerintah kota dengan mengikutsertakan badan permusyawaratan kota dan daerah setempat. Siklus eksekusi strategi baru akan dilakukan dengan asumsi tujuan dan sasaran telah ditetapkan (Akib, 2012). Eksekusi strategi yang berbeda telah dilakukan oleh pemerintah kota dalam mencari kerangka yang berkualitas, baik melalui perluasan batas kantor

yayasan yang rusak, maupun membangun kerangka kerja baru. Pondasi pedesaan dicirikan sebagai kerangka kerja yang bersifat aktual dan memberikan akses kepada administrasi dasar serta administrasi ramah dan keuangan untuk jaringan provinsi (Asnudin A, 2005).

Framework memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak kemajuan dan perkembangan keuangan. Fondasi yang memuaskan diperlukan dan merupakan bagian penting dari kerangka kerja bantuan publik. Kantor nyata yang berbeda sangat penting untuk membantu berbagai pemerintah, moneter, modern dan latihan sosial lokal dan pemerintah.

Sementara itu, menurut (Sadono, 2011) kerangka kerja adalah bagian utama dalam menciptakan latihan keuangan dan memperluas kecakapan

Tindakan keuangan ini adalah sebagai pembangunan jalan, dan kantor pasokan air dan listrik. Kerangka kerja di suatu negara memainkan peran penting dalam mempengaruhi produktivitas dan biaya penciptaan organisasi yang bekerja dalam perekonomian suatu negara.

Kehadiran yayasan sangat penting dalam mendukung perbaikan moneter dan sosial karena kerangka kerja yang baik dapat membangun kelangsungan hidup dan kecakapan baik untuk dunia bisnis maupun untuk area sosial lokal. Kerangka kerja yang memadai menyebabkan biaya penciptaan, transportasi, surat menyurat dan strategi menjadi lebih murah, berapa banyak peningkatan penciptaan, peningkatan tunjangan kerja, sehingga dapat meningkatkan gaji individu. Aksesibilitas yayasan juga akan mempercepat kemajuan yang merata melalui perbaikan kerangka kerja yang disesuaikan

dengan kebutuhan masing-masing dan antar kabupaten untuk mendorong spekulasi baru, posisi baru dan peningkatan gaji individu dan bantuan pemerintah (Suroso, 2015).

Untuk mewujudkan peningkatan kualitas pondasi kota, pemerintah pusat memberikan aset anggaran belanja kepada setiap kota di seluruh Indonesia untuk pelaksanaan pembangunan kota. Dalam pelaksanaannya atau pelaksanaan lebih lanjut, perolehan cadangan rencana keuangan tersebut selanjutnya diarahkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang diperoleh dari APBN.

Berdasarkan penggambaran di atas, peningkatan fondasi nilai sangat signifikan di sebuah kota. Di kota Pandanrejo masih terdapat kemajuan kerangka kerja yang belum sesuai dengan sasaran visi dan misi kota. Oleh karena itu, pencipta ingin mengkaji “Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Infrastruktur”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan gambaran pondasi diatas, maka permasalahan mendasar dapat dibentuk sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Infrastruktur?
2. Apa saja variabel pendukung dan penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa dalam Upaya Peningkatan Kualitas Infrastruktur?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan strategi pemerintah kota dengan tujuan akhir untuk bekerja pada sifat dasar di Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu.
2. Mengetahui variabel pendukung dan unsur penekan dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Infrastruktur di Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

##### 1. Secara Akademik

- a) Pemeriksaan ini bermanfaat untuk menambah informasi bagi para ilmuwan dan pembaca;
- b) Sebagai sumber bahan perspektif bagi tenaga ahli tambahan dan selanjutnya sebagai bahan ujian untuk eksplorasi tambahan.

##### 2. Secara Praktis

- a) Untuk otoritas publik: Eksplorasi ini bermanfaat bagi otoritas pemerintah untuk memikirkan kembali strategi yang ada dan memperhatikan eksekusi yang ada di lapangan;
- b) Untuk daerah: Sebagai bahan data untuk mengetahui strategi peningkatan pondasi mutu yang ada di Indonesia dan sebagai bahan pembantu bagi daerah untuk dapat ikut serta membina pedoman ini di Indonesia
- c) Bagi pencipta: Pemeriksaan ini sangat berharga sebagai perluasan informasi pencipta, khususnya di bidang pelaksanaan pendekatan publik di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Anwar & Setia Hadi. 1996. *Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan*. Prisma, Jakarta.
- Agustino, L. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta.
- Akib, H. 2012. Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Vol. 1 No.,1-11*
- Andi Asnudin. 2005. "Manajemen Proyekm Konstruksi", UNTAD Press-Palu.
- Aswar. 2019. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sibolang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala. *Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako*.
- Basuki, Anton dan Shofwan. 2006. Penguatan Pemerintahan Desa Berbasis *Good Governance*. Malang, SPOD FE UNIBRAW.
- Bungin, P. D. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Bintoron, Tjokroamidjojo. 1978. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. LP3ES, Jakarta.
- Dani P. 2018. "*Ramalan Cuaca BMKG Dibutuhkan dalam Pembangunan Infrastruktur*"  
[https://properti.kompas.com/read/2018/01/26/150204321/ramalan-cuaca\\_bmkg-dibutuhkan-dalam-pembangunan\\_infrastruktur?page=all](https://properti.kompas.com/read/2018/01/26/150204321/ramalan-cuaca_bmkg-dibutuhkan-dalam-pembangunan_infrastruktur?page=all). Diakses 27 Desember 2019.
- Edward C George.1980. *Implementing Public Policy*. America. Congressional Quarterly press.
- Juraidah. 2015. Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Mendik Karya Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser. *eJournal Administrasi Negara, 3 (4) 2015: 1145 - 1157*.
- Keusuma, C.N., dan Suriani. 2015. Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Dasar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal ilmiah ekonomi dan pembangunan, 4(1), 1-18*.
- Lestari, Endah Puji Riyanto dan Romula Adiono. 2010. Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (Studi pada Pavingisasi Jalan Desa

di Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro) Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang.

Lestari, Mega dan Suhadak. 2019. Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Pemerataan Ekonomi Indonesia. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi. Yogyakarta.

Maryaningsih, N., Oki, H., dan Myrnawati, S. 2014. The Role of Infrastructure on Economic Growth In Indonesia. *Economic Researcher in BRE DKM Indonesian Bank*, 17(1), 56-88.

Moleong. Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nugroho, Riant D. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2005. Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

Prasetyo, R.B., dan Firdaus, M. 2009. Pengaruh Infrastruktur Pada Pertumbuhan Ekonomi Wilayah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 2(2), 222-236.

Satka, M. H. 2015. Startegi Pemerintah Desa Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Kerta Buana Kecamatan Tenggarong Seberang). *eJournal Ilmu Administrasi Negara*, 2015, 3 (4) : 1863-1876.

Sari, P. 2011. Analisis Pengaruh Program Pembangunan Infrastruktur Terhadap Penurunan Kemiskinan di Kabupaten Tertinggal. *Tesis Institut Pertanian Bogor*.

Siagian, Sondang P. 2008. *Adminitrasi Pembangunan*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*. Bandung: Aflabeta.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*. Bandung: Aflabeta.

- Suranto. 2014. *Implementasi Kebijakan Otonomi Pelayanan Pendidikan* dalam buku *Manajemen dan Kebijakan Birokrasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Suryono, Agus. 2010. *Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan*. Malang, Universitas Brawijya Press.
- Susantono. 2012. *Manajemen Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Susantono, B. 2013. *Transportasi & Investasi: Tantangan dan Perspektif Multidimensi*, Penerbit PT. Kompas.
- Tahir. 2014. *Tentang Kebijakan dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Tarsila, D. B. 2015. *Straategi Pemerintah Desa Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Sepang Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah*. *Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan*.
- Tjokrowinoto, Moejiarto. 2007. *Pembangunan Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta : Pustaka pelajar.
- Todaro, M.P., dan Smith, S.C. Smith. 2011. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Usman, Sunyoto. 2010. *Infrastruktur, Transportasi dan Pertahanan Sebagai Penggerak Utama Perkuatan Ketahanan dan Daya Saing Nasional*. Jakarta, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional.
- Usman, Sunyoto. 2010. *Infrastruktur, Transportasi dan Pertahanan Sebagai Penggerak Utama Perkuatan Ketahanan dan Daya Saing Nasional*. Jakarta, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional.
- Prasetyo, R.B., dan Firdaus, M. 2009. *Pengaruh Infrastruktur Pada Pertumbuhan Ekonomi Wilayah di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 2(2), 222-236.
- Wahab, A. S. 2008. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Edisi Kedua. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Wahab, A. S. 2005. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Wahab, A. S. 2004. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Wahyuddin. 2019. Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Desa Ako Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara. *Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulak*.

Widjaja H. 2003. *Otonomi Desa*. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Widodo, J. 2010. Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Bumi Aksara: Jakarta.

Winarno, B. 2016. Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus. CAPS: Yogyakarta